

Nama : Nabilla Sevtiana Putri

NPM : 2213031079

Matkul : Ekonomi Industri

SOAL

1. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan Making Indonesia 4.0 dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.
2. Bandingkan pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?
3. Berdasarkan hasil analisis Anda, rancanglah kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini.

JAWABAN

1. Kegagalan Making Indonesia 4.0 dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti terdapat *mismatch* antara desain kebijakan yang berfokus pada adopsi teknologi canggih dengan realitas kemampuan dasar industri domestik yang masih lemah, khususnya pada sektor UMKM. Rendahnya kapasitas teknologi, keterampilan tenaga kerja, serta lemahnya integrasi rantai pasok membuat insentif dan program digitalisasi lebih banyak dinikmati perusahaan besar tanpa menciptakan *spillover effect* yang luas. Serta hambatan institusional seperti birokrasi berbelit, regulasi yang berubah-ubah, serta infrastruktur logistik dan energi yang belum memadai semakin memperlambat implementasi. Dan dari sudut pandang teori kebijakan industri, kondisi ini mencerminkan adanya *market failures* (eksternalitas teknologi, keterbatasan pembiayaan jangka panjang) dan *coordination failures* (ketidaksinkronan antara pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan sektor keuangan) yang tidak berhasil diatasi oleh kebijakan Making Indonesia 4.0.
2. Vietnam berhasil meningkatkan kinerja industrinya dengan strategi *export-oriented industrialization* yang agresif, yaitu menarik investasi asing langsung (FDI) ke sektor padat karya melalui zona ekonomi khusus, insentif fiskal terarah, serta regulasi yang ramah investor. Hal ini memungkinkan Vietnam masuk cepat ke dalam rantai pasok global. Sementara itu, Korea Selatan menempuh strategi berbeda dengan *state-led industrial policy*, di mana pemerintah berperan besar dalam melindungi dan membina

industri strategis melalui pembiayaan terarah, dukungan riset dan inovasi, proteksi temporer, serta program pendidikan teknik yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Yang membedakan efektivitas kebijakan mereka dengan Indonesia adalah konsistensi jangka panjang, fokus pada pembangunan kapabilitas domestik, koordinasi yang kuat antar-lembaga, serta adanya syarat yang mengikat agar insentif benar-benar menghasilkan transfer teknologi dan peningkatan pemasok lokal. Indonesia cenderung lebih menekankan insentif umum tanpa memastikan adanya *linkages* nyata ke industri dalam negeri.

3. Untuk keluar dari jebakan deindustrialisasi dini, kebijakan industri alternatif Indonesia perlu lebih kontekstual dengan menekankan pembangunan kapabilitas domestik seperti:
 - a. Membentuk program *industrial cluster* terintegrasi di sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia) dengan fasilitas bersama seperti laboratorium uji, logistik, dan pusat riset.
 - b. Memperkuat pelatihan vokasi dan *apprenticeship* berbasis industri melalui kerja sama pemerintah–perusahaan, sehingga tenaga kerja memiliki keterampilan sesuai kebutuhan manufaktur modern.
 - c. Menerapkan insentif fiskal bersyarat (*conditional tax incentive* dan *matching grants*) yang hanya diberikan jika investor melakukan transfer teknologi, meningkatkan kandungan lokal, serta membangun pemasok domestik. Keempat, menyediakan akses pembiayaan jangka menengah-panjang melalui *industrial development bank* atau skema kredit bergaransi untuk modernisasi mesin dan investasi UKM.
 - d. Memperbaiki infrastruktur logistik, energi, dan digital di kawasan industri strategis melalui kemitraan publik-swasta (PPP). Rasional dari kebijakan ini adalah menutup kesenjangan kapabilitas, mengatasi kegagalan koordinasi, serta memastikan insentif benar-benar mendorong transformasi struktural.

Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat membangun basis industri yang tangguh, meningkatkan nilai tambah lokal, dan keluar dari tren deindustrialisasi dini.